

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan II (April-Juni), perkembangan inflasi di Kabupaten Situbondo secara umum lebih terkendali dibandingkan Triwulan I. Setelah berakhirnya periode Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, tekanan permintaan masyarakat mulai menurun sehingga harga sebagian besar komoditas pangan kembali stabil. Namun demikian, beberapa komoditas pangan bergejolak (*volatile food*) masih mengalami fluktuasi akibat faktor cuaca, musim panen, dan distribusi.

Perkembangan harga barang dan jasa :

- Tarif transportasi kembali normal setelah arus mudik dan arus balik Idulfitri.
- Tarif jasa restoran relatif stabil seiring normalnya aktivitas masyarakat.
- Tarif listrik, air bersih, LPG, dan BBM relatif stabil mengikuti kebijakan pemerintah.
- Aktivitas perdagangan mulai meningkat kembali sehingga mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Risiko yang perlu diantisipasi pada Triwulan III meliputi:

1. **Perubahan cuaca** yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan hortikultura.
2. **Kenaikan harga komoditas hortikultura**, terutama cabai dan bawang, apabila terjadi penurunan produksi.
3. **Gangguan distribusi** akibat cuaca ekstrem atau hambatan logistik.
4. **Kenaikan biaya produksi pertanian**, seperti pupuk, benih, dan pakan ternak.
5. **Ketergantungan pasokan dari luar daerah** untuk beberapa komoditas strategis.
6. **Potensi peningkatan permintaan** pada masa libur sekolah atau momentum tertentu yang dapat memengaruhi harga pangan dan jasa.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan yang menjadi perhatian utama TPID Kabupaten Situbondo pada Triwulan II meliputi:

- Fluktuasi harga komoditas hortikultura (cabai dan bawang).
- Ketergantungan pasokan dari luar daerah.
- Tingginya biaya distribusi dan logistik.
- Keterbatasan produksi pangan lokal.
- Risiko cuaca terhadap produksi pertanian.
- Belum optimalnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
- Keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
- Perlunya penguatan sistem informasi harga dan stok secara terintegrasi.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan identifikasi tersebut, TPID Kabupaten Situbondo perlu memfokuskan upaya pengendalian inflasi pada:

- memperkuat **ketersediaan pasokan** melalui peningkatan produksi lokal dan KAD;
- menjaga **keterjangkauan harga** melalui Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar apabila diperlukan;

- meningkatkan **kelancaran distribusi** dengan memperbaiki koordinasi rantai pasok;
- memperkuat **komunikasi efektif** melalui pemantauan harga, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan koordinasi lintas instansi sesuai strategi **4K**.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Situbondo **berjalan cukup efektif**. Sinergi antaranggota TPID, pemantauan harga dan stok secara berkala, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta penguatan koordinasi distribusi berhasil menjaga stabilitas harga sebagian besar komoditas strategis. Namun demikian, penguatan produksi pangan lokal, perluasan Kerja Sama Antar Daerah, dan peningkatan kualitas sistem informasi harga tetap menjadi prioritas untuk memperkuat pengendalian inflasi pada triwulan berikutnya.

Pelaksanaan kebijakan pada Triwulan II menunjukkan beberapa hasil sebagai berikut:

- Ketersediaan bahan pangan pokok tetap terjaga pasca-HBKN.
- Harga sebagian besar komoditas strategis relatif stabil, meskipun komoditas hortikultura masih mengalami fluktuasi akibat faktor cuaca dan produksi.
- Distribusi komoditas pangan berjalan lancar sehingga tidak terjadi kelangkaan yang signifikan.
- Koordinasi antaranggota TPID semakin efektif dalam merespons perkembangan harga dan ketersediaan pasokan.
- Gerakan Pangan Murah dan pemantauan pasar membantu menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan tekanan inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan pangan. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga dan stok, serta koordinasi lintas instansi mampu menekan tekanan inflasi pasca-HBKN.

Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu menjadi perhatian, yaitu:

- fluktuasi harga komoditas hortikultura akibat faktor cuaca dan musim panen;
- ketergantungan pasokan dari luar daerah untuk beberapa komoditas;
- tingginya biaya distribusi dan logistik;
- perlunya peningkatan kualitas sistem informasi harga dan stok secara terintegrasi.

Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Memperkuat **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** untuk menjamin kontinuitas pasokan komoditas strategis.
2. Meningkatkan produksi pangan lokal, khususnya komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah, dan hortikultura lainnya.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar berdasarkan hasil pemantauan harga.
4. Mengembangkan sistem pemantauan harga dan stok secara **real time** yang terintegrasi antaranggota TPID.

Meningkatkan efisiensi distribusi melalui koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi

5. terkait.
 6. Memperkuat cadangan pangan pemerintah sebagai instrumen stabilisasi harga.
 7. Meningkatkan edukasi masyarakat terkait konsumsi yang bijak dan pemanfaatan informasi harga resmi.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Ketersediaan Pasokan

- Memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, kelompok tani, dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan stok komoditas strategis.
- Memperluas **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** dengan daerah sentra produksi guna menjamin kontinuitas pasokan beras, cabai, bawang merah, bawang putih, dan komoditas strategis lainnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan **Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** sebagai instrumen stabilisasi apabila terjadi gangguan pasokan.

2. Menjaga Keterjangkauan Harga

- Melaksanakan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** secara berkala di wilayah yang mengalami kenaikan harga atau memiliki tingkat kerawanan pangan.
- Menyelenggarakan operasi pasar secara tepat sasaran apabila terjadi gejolak harga komoditas tertentu.
- Memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan untuk mencegah praktik penimbunan atau spekulasi harga.

3. Peningkatan Produksi Pangan Lokal

- Mendorong percepatan tanam dan peningkatan produktivitas komoditas penyumbang inflasi, khususnya cabai, bawang merah, dan hortikultura.
- Memberikan pendampingan teknis kepada petani melalui penyuluhan, penggunaan benih unggul, serta penerapan teknologi budidaya.
- Memperkuat pengembangan kawasan sentra produksi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

4. Peningkatan Kelancaran Distribusi

- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan distribusi komoditas pangan, terutama pada wilayah dengan akses transportasi yang terbatas.
- Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga kelancaran distribusi dari sentra produksi ke pasar.
- Mendorong efisiensi rantai pasok melalui kemitraan antara petani, distributor, dan pelaku usaha.

5. Penguatan Sistem Informasi Harga dan Stok

- Mengembangkan sistem pemantauan harga dan stok secara **real time** yang terintegrasi antaranggota TPID.
- Meningkatkan frekuensi pelaporan harga dan stok sebagai dasar pengambilan

keputusan yang cepat dan tepat.

- Menyampaikan informasi harga secara berkala kepada masyarakat guna meningkatkan transparansi pasar.

6. Penguatan Komunikasi Efektif

- Meningkatkan intensitas rapat koordinasi TPID untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.
- Melaksanakan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak dan pentingnya menghindari *panic buying*.
- Memperkuat komunikasi dengan media, asosiasi perdagangan, dan pelaku usaha untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

7. Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

- Meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Situbondo, Bank Indonesia, Perum Bulog, BPS, perangkat daerah, instansi vertikal, serta pelaku usaha.
- Mendorong peran aktif BUMD, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan UMKM dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengendalian inflasi.